

**PERSEKUTUAN ALLAH TRITUNGGA
SEBAGAI MODEL PERSEKUTUAN DALAM BIDANG POLITIK
MENURUT JÜRGEN MOLTSMANN**

Yohanes Krismantyo Susanta

Pendahuluan

Tahun 2014 menjadi salah satu tahun bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada tahun ini, seluruh rakyat Indonesia merayakan pesta demokrasi yaitu pemilihan umum (baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakilnya). Meskipun pemilu merupakan suatu peristiwa penting dan bersejarah bagi bangsa Indonesia, tetapi uniknya, peristiwa tersebut seringkali dianggap sebagai “peristiwa biasa” bagi sebagian orang. Pemilu yang dikenal sebagai pesta rakyat (pesta demokrasi) ternyata masih kalah gaungnya dibandingkan pesta lain yang terjadi pada tahun 2014. Hal tersebut mungkin dapat dimaklumi sebab pesta tersebut bukan hanya dinikmati oleh bangsa

Indonesia tetapi seluruh dunia. Pesta tersebut adalah pesta sepak bola yaitu turnamen Piala Dunia yang diselenggarakan di Amerika Selatan, tepatnya di Brasil. Indonesia memang tidak berpartisipasi dalam kejuaraan empat tahunan tersebut, tetapi animo masyarakat Indonesia terhadap peristiwa tersebut juga sangat besar.

Hal tersebut tentu saja disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu hal yang mungkin menjadi penyebab adalah nilai kedua peristiwa tersebut bagi seseorang. Piala Dunia jelas menjanjikan tontonan yang menarik. Meskipun tidak memiliki kaitan apa pun dengan tim yang bertanding, Piala Dunia selalu disambut dengan antusias. Alasannya sederhana, ada sukacita yang dihadirkan. Ada gairah, semangat, dan emosi menjadi satu. Bahkan sepak bola sendiri seringkali mendapat label “agama tanpa Tuhan.” Sepak bola dan piala dunia khususnya, selalu ada di hati para penggemarnya. Bahkan, orang-orang yang tidak menyukai olah raga tersebut untuk sesaat menjadi latah untuk mengikutinya. Sebaliknya, sebagian orang cenderung tidak terlalu memusatkan perhatiannya kepada pemilu yang berlangsung (kecuali orang-orang yang memang berkepentingan seperti para calon pemimpin dan keluarganya, tim sukses masing-masing calon, para petugas Komisi Pemilihan Umum [KPU] serta aparat penegak hukum). Selebihnya, orang sibuk dengan urusan masing-masing. Kesadaran akan pentingnya pemilu bagi bangsa ini masih tergolong rendah. Masyarakat cenderung malas untuk memikirkan persoalan politik di negeri ini. Meskipun berbagai usaha terus dilakukan termasuk oleh gereja, akan tetapi usaha

tersebut masih belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Sebagian masyarakat tampaknya pesimis menghadapi pemilu yang sedang berlangsung. Sebagian acuh tak acuh karena merasa tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa dari pemimpin yang kelak terpilih. Selain itu, terdapat pula pandangan yang berkembang bahwa politik adalah sesuatu yang kotor sehingga sebagian orang, termasuk orang Kristen enggan untuk memusatkan perhatian mereka terhadap persoalan tersebut. Ya, politik seringkali dianggap sebagai hal yang kotor sehingga kurang mendapat perhatian.

Akan tetapi di dalam tulisan ini akan disajikan politik dari sudut pandang yang berbeda: politik Allah Tritunggal! Tulisan ini akan berusaha melihat salah satu bidang kehidupan manusia yang nyata yaitu politik dengan memanfaatkan prinsip persekutuan Allah Tritunggal untuk meluruskan kekeliruan pemahaman yang masih dipegang oleh sebagian orang tentang politik. Dalam tulisan ini penulis akan lebih memusatkan perhatian kepada pandangan Jürgen Moltmann dan disertai dengan pandangan beberapa ahli yang mendukung pandangannya, misalnya Leonardo Boff dan Veli-Matti Kärkäinen. Meskipun pandangan Moltmann tidak sepenuhnya dapat diterima, akan tetapi diharapkan melalui tulisan ini, para pembaca juga akan semakin diperkaya dan tergerak untuk lebih memikirkan politik sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang percaya.

Sekilas tentang Doktrin Tritunggal

Salah satu doktrin Kristen yang dianggap sangat sulit dipahami dan dijelaskan adalah doktrin Tritunggal. Doktrin ini merupakan rumusan yang dihasilkan oleh bapa-bapa gereja sekaligus hasil dari penafsiran mereka terhadap Kitab Suci serta disepakati melalui konsili-konsili.¹ Gereja perdana yang sedang mencari identitas sebagai pengikut Kristus (Kristen) telah berusaha dan berhasil merumuskan sebuah doktrin monumental yang dianggap unik dan menjadi pembeda dengan agama lain.² Dalam perkembangannya, kekristenan memang berhasil mempertegas kemapanannya sebagai sebuah “agama baru” dengan ciri-ciri khas yang dimilikinya.

Meskipun doktrin Tritunggal menjadi doktrin yang dianggap khusus dan unik serta melalui proses perumusan yang tidak mudah, akan tetapi doktrin ini pun tidak luput atau kebal dari kritik. Dalam perjumpaan dengan agama-agama lain, doktrin ini justru menjadi salah satu doktrin yang seringkali mendapat serangan yang sangat tajam di samping doktrin Kristologi. Sebagian besar orang Kristen juga mengalami kesulitan ketika diminta untuk menjelaskannya.

1. Sebagai catatan, konsili-konsili yang diadakan pada mulanya tidak langsung merumuskan masalah tritunggal. Doktrin tersebut baru dirumuskan setelah gereja membahas dan merumuskan doktrin Kristus (Kristologi).

2. Hal tersebut secara khusus merupakan salah satu usaha untuk membedakan kekristenan dengan keyahudian sebab pada awal kemunculannya, kekristenan dianggap sebagai salah satu sekte di dalam agama Yahudi.

Meskipun dianggap sulit, faktanya, sejumlah teolog justru membangun teologinya berdasarkan prinsip dari doktrin Tritunggal tersebut. Doktrin Tritunggal justru dipandang sebagai doktrin yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek hidup manusia. Catherine M. Lacugna mengatakan bahwa Tritunggal telah memunculkan sejumlah prinsip yang dapat diterapkan dalam kajian etika, spiritualitas, ekologi, dan politik.³ Berangkat dari pemikiran tersebut, maka pada bagian selanjutnya dari tulisan ini akan menelusuri secara ringkas aspek praktis dari doktrin Tritunggal untuk menunjukkan bahwa doktrin tersebut memang menjawab kebutuhan manusia di segala bidang kehidupan.

Tritunggal: Doktrin yang Paling Praktis!

Bagaimana Tritunggal - sebagai doktrin yang dianggap sukar untuk dijelaskan - menjadi sesuatu yang relevan bagi kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang politik? Bagi sebagian orang, Tritunggal adalah sebuah doktrin khas Kristen yang mustahil untuk dipahami serta terlepas dari isu-isu kehidupan nyata.⁴ Setidaknya, itulah pemahaman yang masih dipegang oleh sebagian orang Kristen. Akan tetapi, sebagian orang juga kemungkinan akan terkejut apabila mendengar atau membaca suatu pandangan bahwa doktrin

3. Catherine Mowry Lacugna, "The Practical Trinity," *The Christian Century*, Vol. 109 (Juli 1992): 681.

4. Bruce A Ware, "The Father, the Son, and the Holy Spirit: The Trinity as Theological Foundation for Family Ministry," *The Journal of Family Ministry*, Vol 1 Issue 2 (Spring/Summer 2011): 4.

Tritunggal sesungguhnya merupakan salah satu doktrin yang paling praktis di antara seluruh doktrin Kristen.⁵ Pertanyaannya adalah mengapa ia dapat disebut sebagai salah satu doktrin yang paling praktis? Bruce A. Ware mengungkapkan sebuah alasan sebagai berikut:

Because the Trinity helps us to understand how the Persons of the Godhead—the Father, the Son, and the Holy Spirit—relate to one another and so work in this world, as well as how the triune God has designed many relationships among us humans to take place. Wherever you have human relationships—which is about everywhere you look!—you have the opportunity to ask, “How do relationships among the trinitarian Persons help us understand how our relationships are to be lived out in ways that better reflect something of the triune God and better express God’s designed purposes for us, his human creatures made in his image?”⁶

Hal yang senada diungkapkan oleh Kathryn Tanner berdasarkan pembacaannya terhadap tulisan Leonardo Boff, bahwa kesatuan dan kepelbagaian dari Tritunggal dapat dijelaskan secara lengkap dalam berbagai istilah, khususnya ketika “makna dari “pribadi” di dalam diskusi trinitarian tradisional didorong dalam pengertian yang modern dari “pribadi,” yaitu kesadaran subyek yang

5. Lacugna, “The Practical,”: 679 dan Ware, “The Father,”: 4.

6. Ware, “The Father,”: 4.

berorientasi kepada *yang lain*.⁷ Lebih lanjut, ia mengatakan suatu pernyataan yang menarik, demikian:

The relation between one substance and three persons in the Trinity can be unpacked in terms of a relation between a community and its members; relations among the three trinitarian persons, in terms of the internal constitution of community; etc. As a result of these efforts of interpretation, the Trinity becomes, in turn, away of commenting on common, very basic political questions of the day.⁸

Pandangan di atas menunjukkan bahwa doktrin Tritunggal di dalam dirinya sendiri sesungguhnya mengandung prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam segala bidang kehidupan manusia termasuk dalam bidang politik.

Membangun Sebuah Teologi politik?

Bagi sebagian orang yang membaca tulisan ini mungkin masih akan mengajukan pertanyaan tentang kaitan antara Tritunggal dengan politik. Apakah mungkin Tritunggal – yang seringkali diberi embel-embel “Mahakudus”- mendukung prinsip-prinsip politik yang oleh kebanyakan orang disebut sebagai sesuatu yang kotor?

Anggapan bahwa politik adalah sesuatu yang kotor bukanlah tanpa dasar. Ketika kita melihat kelakuan dari para elit politik

7. Kathryn Tanner, “Trinity,” *The Blackwell Companion to Political Theology*. peny. Peter Scott dan William T. Cavanaugh (Oxford: Blackwell, 2004), 321.

8. Tanner, “Trinity,”: 321.

khususnya di Indonesia, rakyat mulai bersikap skeptis dan memandang bahwa politik tidak ada hubungannya dengan kehidupan rohani. Sudah sejak lama pula politik dianggap sebagai sesuatu yang hanya berguna bagi pihak yang berkuasa. Rakyat kecil tidak terlalu *ambil pusing* terhadap carut marut kehidupan politik karena merasa bahwa rakyat sama sekali tidak merasakan manfaat apa-apa daripadanya. Bagi sebagian orang, politik identik dengan permainan, tipu muslihat, dan mencari keuntungan diri sendiri.

Dalam kekristenan, politik dulunya juga tidak dipedulikan. Politik cenderung untuk di jauhi oleh kekristenan itu sendiri. Menurut Andreas A. Yewangoe, salah satu sebabnya adalah akibat dari pietisme yang beranggapan bahwa politik hanya berurusan dengan hal duniawi dan tidak pantas dilakukan oleh orang Kristen.⁹ Kesalahan pietisme yang sangat mendambakan keselamatan tentu saja tidak merasa perlu melihat politik sebagai bidang yang harus dihadapi¹⁰. Dalam perkembangannya, pemahaman gereja terhadap politik mulai berubah. Gereja lambat laun mulai berani berbicara tentang politik. Akan tetapi, sikap politik gereja di masa lalu juga dikritisi oleh banyak orang. Sikap politik gereja di masa lalu oleh Gerrit Singgih disebut telah “menempatkan orang dalam struktur

9. Andreas A. Yewangoe, “Visi Kristen Mengenai Politik,” *Teologi Politik: Panggilan Gereja di Bidang Politik Pascaorde Baru*, peny. John Campbell-Nelson, dkk. (Makassar: Oase Intim, 2013), 91.

10. Yewangoe, “Visi Kristen,” 91.

kekuasaan pemerintah, berlindung kepada penguasa.”¹¹ Akibatnya, politik gereja adalah politik yang hanya mencari aman dengan cara berlindung di bawah ketiak penguasa. Gereja ingin melindungi dirinya sendiri dari berbagai ancaman yang mungkin timbul. Berlindung kepada penguasa menurut Zakharia Ngelow yang mengutip Gerrit Singgih, merupakan “pengendalian yang berlebihan terhadap Roma 13.”¹² Ketaatan terhadap pemerintah dalam Roma 13 dipahami sebagai ketaatan mutlak.¹³ Hal ini entah disadari atau tidak, justru mendukung dan menumbuhkan sikap pro terhadap kekuasaan dari pemimpin tunggal karena dianggap sebagai wakil Allah yang justru cenderung tidak menghargai perbedaan dan kebebasan serta sarat dengan kepentingan pribadi atau golongan.

Kondisi tersebut sekali lagi memunculkan sikap skeptis mengenai perlunya orang Kristen/ gereja untuk memikirkan tentang masalah politik. Oleh karena itu, tawaran untuk membangun sebuah politik Trinitarian kemungkinan akan membuat sebagian orang mengerutkan dahi mereka. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi para teolog yang secara serius memikirkan hal ini. Sebab, tidak dapat disangkal bahwa politik adalah bagian dari kehidupan manusia di bumi ini dan gereja berada di dalamnya. Gereja entah mau atau tidak,

11. Emanuel Gerrit Singgih, *Iman dan Politik dalam Era Reformasi di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997), 29.

12. Zakharia J. Ngelow, “Beberapa Catatan mengenai “Politik Kristen di Indonesia,” *Teologi Politik: Panggilan Gereja di Bidang Politik Pascaorde Baru*, peny. John Campbell-Nelson, dkk. (Makassar: Oase Intim, 2013), 32.

13. Ngelow, “Beberapa Catatan,” 32.

suka atau tidak, akan senantiasa terhisab di dalamnya. Sebagian teolog beranggapan bahwa kita memiliki hak untuk berbicara tentang apa pun dalam relasi dengan Allah, termasuk dalam hal politik.¹⁴ Menurut Tanner, beberapa teolog berpendapat bahwa “Sebuah teologi tidak harus menunggu topik-topik tertentu muncul untuk dapat disebut sebagai teologi politik sebab pada hakikatnya, *All theology is political.*”¹⁵ Hal tersebut disebabkan sedikitnya oleh dua alasan: Pertama, berdasarkan fakta bahwa Kekristenan bukan sekadar *a body of beliefs* tetapi juga tentang *a way of living in which beliefs are embeded*. Kedua, teologi selalu membuat penafsiran terhadap politik. Teologi memasukkan gambaran sosial dan politik untuk sebuah tujuan teologis.¹⁶

Hal tersebut sekali lagi menandakan bahwa sesungguhnya politik merupakan salah satu bidang pelayanan yang tidak boleh diabaikan dan dihindari. Menurut Yewangoe, hal tersebut sebenarnya bukanlah pandangan yang baru sama sekali, sebab sudah ada di dalam Alkitab dan tulisan-tulisan bapa-bapa gereja belakangan juga berisi ajakan untuk terlibat di dalam politik.¹⁷ Politik memang berurusan dengan kekuasaan. Pada dirinya, kekuasaan tidak perlu ditakuti dan dijauhi, asal saja dipakai dengan benar bagi

14. Tanner, “Trinity,”: 319.

15. Tanner, “Trinity,”: 319.

16. Tanner menambahkan bahwa istilah-istilah seperti “tuan, kerajaan, keadilan, dan lain-lain” dapat dikategorikan sebagai gambaran sosial dan politik. Lih. Tanner, “Trinity,”: 320.

17. Yewangoe, “Visi Kristen,”: 92.

kesejahteraan bersama.¹⁸ Akan tetapi, di dalam praktiknya, politik dari pihak yang berkuasa memang cenderung bersifat otoritarianisme. Beberapa negara (bahkan gereja yang mulai terbuka terhadap politik) justru memperkuat anggapan bahwa politik merupakan hal yang kotor sebab politik dianggap sebagai cara untuk memperoleh kekuasaan atau kedudukan serta keuntungan dengan berbagai cara, termasuk mengorbankan orang lain.

Politik Trinitarian sebagai Respon terhadap *Political Monotheism* dan *Clerical Monotheism*

Jürgen Moltmann dalam bukunya *The Trinity and The Kingdom*, melihat bahwa ada yang salah dengan politik yang dianut oleh masyarakat (negara) termasuk gereja. Moltmann beranggapan bahwa ada sebuah relasi yang erat antara doktrin Allah dengan aturan politik. Politik dan teologi monoteis menurutnya adalah dua hal yang terkait erat dan sekaligus melegitimasi politik monoteis yang demikian: “Gagasan tentang pemerintahan Allah di surga dan di bumi... umumnya telah membenarkan adanya dominasi dalam bidang moral, kegamaan dan politik dan membuatnya menjadi sebuah hirarki: Pemerintahan yang kudus.”¹⁹ Monoteisme memahami Allah dalam pengertian Allah yang berdaulat dan hal tersebut justru melegitimasi sebuah struktur hirarki seperti yang

18. Yewangoe, “Visi Kristen,”: 92.

19. Jürgen Moltmann, *The Trinity and The Kingdom* (Minneapolis: Fortress, 1993), 191-195

tampak dalam monarkianisme. Dengan demikian, bagi Moltmann, monarkianisme identik dengan monoteisme.²⁰ Hal yang sama diungkapkan oleh Leonardo Boff²¹ yang juga beranggapan bahwa monoteisme diduga kuat telah mendukung bentuk pemerintahan yang bersifat otoritarianisme, yang kekuasaannya secara eksklusif dipegang oleh seorang pemimpin tunggal atau sebuah kelompok.²² Dengan demikian, baik Moltmann maupun Boff telah melakukan kritik terhadap politik monoteis dan sistem pemerintahan gereja yang monoteis.²³

Moltmann sendiri membedakan antara dua bentuk monoteisme yang memperkuat ide penindasan: *Political* dan *clerical monotheism*. Politik monoteis menurutnya adalah salah satu bentuk hierarki dunia yang berpuncak pada monarki yang ilahi dan teologi Kristen telah mengambil model politik absolut untuk Allah. Distorsi

20. Moltmann, *The Trinity*, 191

21. Menurut Kärkäinen, Boff sedikit banyak berhutang kepada Moltmann terkait dengan istilah kunci yang ia pakai. Seperti halnya Moltmann, Boff juga menggantikan “monotheisme” yang mendukung hierarki dan kekuasaan (*dominion*) dengan persekutuan kasih serta ide tentang Tritunggal sebagai sebuah “open society” Lih. Veli-Matti Kärkäinen, *The Trinity: Global Perspective* (Louisville: Westminster John Knox Press, 2007), 276.

22. Leonardo Boff, *Trinity and Society*, terj. Paul burns (Maryknoll: Orbis, 1988), 20.

23. Bagi Moltmann, Para teolog seperti Justin, Tatia dan Tertullian membicarakan tentang pemerintahan Allah dalam istilah Monarkhi. Monoteisme Monarkhian tersebut menjadi sebuah “*seductive religious-political ideology*” ketika hal tersebut dipakai untuk mendukung hegemoni Roma: “Pemimpin Universal di Roma telah menjadi gambaran dari pemerintah di Surga. Lih. Moltmann, *The Trinity*, 131.

dari konsep tentang Allah ini justru melegitimasi berbagai bentuk politik absolutisme.²⁴ Hal tersebut sekaligus melegitimasi pemahaman dari berbagai sistem hirarki dan penindasan sosial. Hal tersebut juga ditandaskan dengan skema satu Allah satu pemerintahan politik- satu bangsa.²⁵

Sementara itu, *clerical monotheism* - bagi Moltmann - juga secara implisit menerapkan monarki Ilahi di dalam hierarki gereja, khususnya sistem Episkopal dan Papal.²⁶ Skema satu Allah- satu Kristus- satu Petrus- satu Paus (bishop)- satu gereja, juga berfungsi untuk melegitimasi supremasi struktur hirarki dari gereja.²⁷ Hal ini terjadi sebab seringkali terdapat penekanan berlebihan bahwa Bishop mewakili Kristus terhadap gereja-Nya sebagaimana Kristus mewakili Allah (seringkali hal tersebut dipahami secara literal sehingga suara Bishop adalah suara Tuhan sendiri). Demikian halnya dengan otoritas kepausan seringkali dianggap sebagai jaminan kesatuan gereja. Otoritas ini berdasarkan penafsiran terhadap suksepsi apostolik Petrus berdasarkan teks Matius 16:18.²⁸ Akibatnya yang terjadi adalah (kadang-kadang) keputusan dari satu pihak dianggap sebagai kebenaran mutlak yang harus diikuti.

Berangkat dari konsep pemikiran yang ada dan berkembang tersebut, Moltmann berusaha menawarkan sebuah tandingan (baca:

24. Moltmann, *The Trinity*, 192-193.

25. Moltmann, *The Trinity*, 195.

26. Moltmann, *The Trinity*, 201.

27. Moltmann, *The Trinity*, 201.

28. Moltmann, *The Trinity*, 201.

solusi) yaitu pemikiran politik yang diambil dari prinsip persekutuan Allah Tritunggal. Bagian selanjutnya dari tulisan ini akan memaparkan persekutuan Allah Tritunggal sebagai model bagi kehidupan di bidang politik.

Persekutuan Allah Tritunggal Sebagai Model bagi Kesetaraan dan Kebebasan dalam Kehidupan Bersama di Bidang Politik

Sebagai respon terhadap *political and clerical monotheism*, maka Jürgen Moltmann mengusulkan sebuah model politik dalam perspektif Trinitarian.²⁹ Moltmann berpendapat bahwa doktrin Tritunggal menyediakan model dan dasar bagi struktur politik yang egaliter (setara) dan hal tersebut dapat dimulai dari gereja sendiri (politik Trinitarian sebagai pengganti dari politik monoteis).³⁰ Seperti halnya Moltmann, Leonardo Boff juga menolak politik monoteis dan menawarkan Tritunggal sebagai tandingan. Alasan dari pandangan Boff ini adalah karena sesungguhnya, *“Trinity is good news especially for those who are oppressed and yearn for liberation.”*³¹

29. Hal tersebut sesungguhnya bukanlah sesuatu yang benar-benar baru. Jauh sebelumnya, Levinas telah mengatakan bahwa politik modern sebenarnya (dan seharusnya) telah bersifat Trinitarian sejak Revolusi Prancis, dengan tidak hanya berisikan kebebasan (*freedom/liberty*) dan kesetaraan (*equality*), tetapi juga persaudaraan (*fraternity*) Lih. Howard Caygill, *Levinas and the Political* (London and New York: Routledge, 2002). 3.

30. Moltmann, *The Trinity*, 202-203.

31. Boff, *Trinity and Society*, 6.

Menurut Boff, ketika seseorang membicarakan tentang Tritunggal, ia harus ingat bahwa ia sedang membicarakan tentang persekutuan dari tiga pribadi Ilahi dan persekutuan tersebut berarti persatuan dari pribadi-pribadi dan berdasarkan manifestasi dari Allah Tritunggal yang Esa.³² Bagaimana menjelaskan persekutuan dari tiga pribadi Ilahi tersebut? Teolog ortodoks telah memakai sebuah kata yang mulai dikenal luas pada abad ketujuh, khususnya yang digunakan oleh St. John Damaskus: *Perichoresis*.³³ *Perichoresis* berarti tindakan satu pribadi yang terlibat dengan dua pribadi yang lain. Masing-masing dari pribadi Ilahi merembesi yang lain dan mengizinkan dirinya sendiri untuk dirembesi oleh pribadi tersebut.³⁴ Penafsiran ini mengungkapkan kasih dan kehidupan yang terdapat di dalam natur Ilahi tersebut. Natur dari kasih tersebut adalah untuk mengkomunikasikan diri, sementara kehidupan tersebut secara alami memperluas dan mencari untuk memultiplikasikan dirinya sendiri.³⁵ Lebih lanjut Boff mengatakan bahwa ketiga pribadi tersebut di dalam kekekalan menemukan dirinya sendiri di dalam sebuah letupan yang tak terhingga dari kasih dan kehidupan dari satu kepada yang lainnya; masing-masing pribadi Ilahi tersebut berdiam di dalam yang lain.³⁶

32. Leonardo Boff, *Holy Trinity, Perfect Community*, terj. Phillip Berryman (Maryknoll: Orbis, 2000) 14.

33. Boff, *Holy Trinity*, 14.

34. Boff, *Holy Trinity*, 14.

35. Boff, *Holy Trinity*, 14.

36. Boff, *Holy Trinity*, 14.

Dalam bukunya yang terdahulu, *Trinity and Society*, Boff juga menegaskan bahwa *perichoresis* berkaitan dengan pemahaman mengenai relasi dan persekutuan dari pribadi Ilahi. Hal tersebut tampak dari perkataannya,

The essential characteristic of each Person is to be *for* the others, *through* the others, *with* the others and *in* the others. They do not exist *in* themselves for themselves: the 'in themselves' is *for* 'the others'.³⁷

Dalam usahanya menjelaskan mengenai Tritunggal, Boff juga memberikan analogi yang menarik mengenai Tritunggal dan masyarakat. Menurutnya, manusia adalah pribadi yang tidak dapat hidup sendirian di dalam masyarakat. Masyarakat (*society*) bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, entah diciptakan oleh Allah atau terjadi secara alamiah.³⁸ Masyarakat merupakan hasil dari tiga kekuatan yang selalu bekerja bersama-sama dan terus menerus; di dalam kekuatan inilah kita bisa mengidentifikasi jejak-jejak Tritunggal.³⁹

Pertama, ada kekuatan ekonomi yang dengannya manusia melakukan proses produksi dan re-produksi. Melaluinya pula manusia bisa menikmati makanan, memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsinya. Kedua, ada kekuatan politik yang melaluinya kita berorganisasi, mendistribusikan kuasa (*power*), bekerja, dan bertanggung

37. Boff, *Trinity and Society*, 127-128.

38. Boff, *Trinity and Society*, 128.

39. Boff, *Holy Trinity*, 41.

jawab. Ketiga, ada kekuatan budaya yang melaluinya manusia menciptakan nilai-nilai dan makna bagi kehidupan. Kekuatan budaya juga membangkitkan ritual keagamaan, filsafat, seni, dan simbol-simbol yang mengekspresikan nilai-nilai dan pemikiran manusia. Ketiga kekuatan ini bercampur baur di dalam membangun, mendirikan, dan mengembangkan masyarakat. Mereka bekerja secara bersama-sama. Maka politik dan budaya adalah di dalam (*within*) ekonomi, dan demikian seterusnya.⁴⁰

Selain mengungkapkan tentang kesatuan Ilahi di dalam persekutuan *perichoresis* dari tiga pribadi Ilahi, Boff juga menjelaskan tentang implikasi sosial-politik dan ekonomi dari kesatuan tersebut. Menurutnya, relasi kasih yang kekal di dalam Allah ditunjukkan oleh kesetaraan dan persekutuan di dalam persatuan *perichoresis* yang dapat berfungsi sebagai *prototype* dari komunitas, baik struktur sosial politik maupun gereja.⁴¹ Di sini, Boff menunjuk kepada teori klasik dari *vestigia trinitatis* dan ia mengatakan bahwa "*Human society contains a vestigium trinitatis because the Trinity is the divine society.*"⁴² Hal ini berarti bahwa doktrin Tritunggal dipahami sebagai persatuan *perichoresis* dari Allah yang dapat menolong manusia untuk menghadapi hirarki dan tekanan struktur sosial dan sekaligus menciptakan manusia yang lebih *genuine* yang merefleksikan persekutuan Allah yang dicirikan dengan kasih, kesetaraan, dan kebebasan.⁴³

40. Boff, *Holy Trinity*, 41-42.

41. Boff, *Holy Trinity*, 42.

42. Boff, *Trinity and Society*, 5-6.

43. Boff, *Trinity and Society*, 6.

Senada dengan itu, Moltmann yang kepadanya Boff meminjam beberapa istilah kunci, memulai argumentasinya tentang Allah Tritunggal dengan tidak berangkat dari sebuah dasar filosofis tentang Allah yang Esa, karena menurutnya, refleksi tentang Allah Tritunggal seharusnya dimulai dari tiga pribadi ilahi.⁴⁴ Untuk alasan itulah, Kärkäinen menyebut Moltmann sebagai sosok yang mewakili trinitarianisme sosial yang radikal.⁴⁵ Hal ini karena Moltmann memandang kesatuan dari tiga pribadi seharusnya tidak dilihat dalam “substansi homogenus” ataupun “sebagai subyek yang identik”.⁴⁶ Lebih lanjut, menurut Kärkäinen, yang mengutip Moltmann, “konsep kesatuan Ilahi adalah penyatuan/perpaduan dari *Tri-unity*.”⁴⁷ Moltmann juga mengatakan bahwa hal tersebut seharusnya dirasakan dalam *perichoresis* dari pribadi-pribadi Ilahi. Kasih yang kekal dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus hidup satu sama lain dalam sebuah tingkatan bahwa mereka adalah “satu.”⁴⁸ *Perichoresis* menyediakan *link* antara ketigaan (*threeness*) dan kesatuan (*unity*) tanpa mereduksi satu pribadi Ilahi kepada yang lainnya.⁴⁹ Secara tepat dipahami bahwa “*perichoresis rules out any form of*

44. Moltmann, *The Trinity*, 149.

45. Kärkäinen, *The Trinity*, 110.

46. Kärkäinen, *The Trinity*, 110.

47. Kärkäinen, *The Trinity*, 111.

48. Moltmann, *The Trinity*, 175.

49. Moltmann, *The Trinity*, 175.

subordinationism within the divine life."⁵⁰ Lebih lanjut, Moltmann mengatakan dengan tegas,

Finally, through the concept of perichoresis, all subordinationism in the doctrine of the Trinity is avoided. It is true that the Trinity is constituted with the Father as the starting point, inasmuch as he is understood as 'the origin of the Godhead.' But this 'monarchy of the Father' only applies to the constitution of the Trinity. It has no validity within the eternal circulation of the divine life, and none in the perichoretic unity of the Trinity. Here the three person are equal; they live and are manifested in one another and through one another.⁵¹

Moltmann mengatakan bahwa gagasan tentang persatuan *perichoresis* dari Allah adalah sebuah model yang menggairahkan bagi masyarakat. Ia mengatakan, "Allah Tritunggal adalah komunitas, persekutuan, sebuah undangan kepada komunitas-Nya, dan membuat diri-Nya sendiri sebagai model bagi masyarakat yang adil dan yang hidup di dalam dunia."⁵² Dengan kata lain, doktrin Tritunggal adalah sebuah "doktrin tentang kebebasan" yang melawan bentuk *political* dan *clerical monotheism*.⁵³ Dengan demikian, teologi politik yang benar-benar Kristen seharusnya mendukung struktur politik yang merefleksikan kesatuan *perichoresis* dari ketiga pribadi tersebut (Bapa, Anak, dan Roh Kudus). Sebagai

50. Moltmann, *The Trinity*, 175.

51. Moltmann, *The Trinity*, 176.

52. Moltmann, *The Trinity*, 196.

53. Moltmann, *The Trinity*, 197.

gambar dari Tritunggal (*imago trinitatis*), manusia dipanggil untuk merealisasikan persekutuan yang dijumpai dalam *perichoresis* Ilahi.⁵⁴ Dengan demikian, sistem sosial dan politik seharusnya terkait erat dengan kasih yang kekal dari Allah Tritunggal melalui relasi yang berkualitas, bebas, dan setara.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Veli-Matti Kärkäinen dengan tepat meringkaskan tesis dari Moltmann bahwa "*Human societies, including the church, should reflect the principle of egalitarianism and mutual "indwelling" evident in the Trinity*"⁵⁵ Doktrin Tritunggal menyediakan sebuah pengertian untuk mengharmonisasikan pribadi dan masyarakat di dalam sebuah komunitas antara laki-laki dan perempuan, tanpa mengorbankan satu dengan yang lainnya.⁵⁶ Doktrin Tritunggal dapat "memainkan peran bagi *a truly humanistic society.*"⁵⁷ Lebih lanjut, Moltmann mengatakan bahwa sebuah teologi dari sistem pemerintahan gereja yang merefleksikan kesatuan *perichoresis* tidak akan menyetujui otoritas gereja yang terpusat kepada satu pribadi tunggal.⁵⁸ Demikian pula, gereja Kristen seharusnya bersesuaian dengan realitas dari Allah sebagai relasi yang komunal, yaitu relasi antara otoritas dan ketaatan di dalam gereja digantikan dengan dialog, konsensus, dan harmoni sedangkan bentuk-bentuk dari pemerintahan gereja yang

54. Moltmann, *The Trinity*, 197.

55. Kärkäinen, *The Trinity*, 113.

56. Kärkäinen, *The Trinity*, 113.

57. Moltmann, *The Trinity*, 199-200

58. Moltmann, *The Trinity*, 201.

dengan baik merefleksikan *Social Trinity* berdasarkan pada persaudaraan.⁵⁹

Doktrin Tritunggal adalah doktrin tentang kebebasan. Allah Tritunggal dalam Alkitab adalah Allah yang *“unceasingly desires the freedom of his creation.”*⁶⁰ Kebebasan tersebut memanglah belum sempurna selama manusia masih hidup di dalam dunia. Ketika manusia dan Allah bertemu muka dengan muka, maka kebebasan tersebut akan sempurna. Kebebasan tersebut juga berarti sebuah partisipasi yang tidak dapat dirintangi di dalam Allah Tritunggal dan yang tidak habis-habisnya di dalam kepenuhan dan kemuliaan-Nya.⁶¹ Moltmann mengutip perkataan Agustinus untuk menggambarkan kondisi tersebut sebagai berikut: *“Our hearts are restless until they find rest in thee. And when we think of freedom we may say: ‘our hearts are captive until they become free in the glory of the triune God.’”*⁶²

Penutup

Dunia teologi ternyata memiliki sumbangsih yang besar dalam bidang politik. Salah satu pemikiran Moltmann sebagai seorang teolog adalah menunjukkan bahwa pemahaman seseorang atau kelompok tentang Allah *kemungkinan* dapat memengaruhinya dalam bersikap secara politik. Hal tersebut sudah dibuktikan oleh

59. Moltmann, *The Trinity*, 202.

60. Moltmann, *The Trinity*, 218.

61. Moltmann, *The Trinity*, 222.

62. Moltmann, *The Trinity*, 222.

beberapa negara yang mengusung politik monoteis⁶³ sebagai dasar bagi hierarkianisme yang tidak sedikit telah jatuh kepada sebuah penindasan dan kekerasan kepada pihak yang lemah (keyakinan tersebut dilegitimasi oleh penafsiran yang keliru atas beberapa bagian dari kitab suci yang mengatakan tentang kepatuhan kepada pemerintah atau pemerintah adalah wakil Allah. Dengan demikian, pemerintah menjalankan kehendak Allah dan selalu benar). Celaknya, hal demikian juga seringkali terjadi di dalam sistem pemerintahan gereja. Hal yang menarik adalah bahwa di dalam kekristenan, terdapat sebuah pemikiran untuk melawan *empire* tetapi dalam praktiknya, gereja yang telah mapan tersebut justru perlahan-lahan menjadi *empire* yang baru.

Dalam pemahaman *New Perspective on Paul*, para penafsir meyakini bahwa Paulus telah melakukan subversi yang hebat terhadap kekaisaran Romawi sebagaimana tulisan NT. Wright tentang *Gospel and Empire* di dalam bukunya *In Fresh Perspective*.⁶⁴

63. Menurut penulis, -berbeda dengan Moltmann- politik yang dikenal sebagai politik monoteis tidak sepenuhnya dapat dipersalahkan. Kemungkinan besar masalahnya terletak pada penerapan dari setiap pribadi yang keliru di dalam memahaminya (hal ini tentunya memerlukan diskusi lebih lanjut dan jawaban atas persoalan ini kiranya melewati maksud dan tujuan tulisan ini). Meskipun demikian, pandangan Moltmann tidak dapat diabaikan begitu saja. Pandangan Moltmann justru semakin memperkaya pemahaman teologi yang ada sekaligus mengajarkan bagaimana teologi dapat menyentuh setiap aspek kehidupan manusia.

64. N. T. Wright, *Paul: In Fresh Perspective* (Minneapolis: Fortress, 2005), 57-79.

Akan tetapi kenyataan yang terjadi saat ini adalah, sebagian gereja justru mengembangkan dan menyuburkan *empire* serta menjunjung tinggi hirarkianisme. Sebagai contoh kecil, ketika seorang melihat bangunan gereja tertentu, seringkali orang tersebut mengatakan, “ini gereja tuan A.” Pernyataan tersebut bisa ditafsirkan dalam dua pengertian. Pertama, hal tersebut dapat berarti bahwa orang tersebut, secara sadar atau tidak, telah menegaskan kekuasaan dari tuan A sehingga ia dianggap sebagai pemilik gereja tersebut (yang sekali lagi, justru mendukung *empire* dan hierarki di dalam gereja), karena gereja tersebut menjadi identik dengan nama pribadi. *Kedua*, hal tersebut bisa juga diartikan sebagai sindiran terhadap bentuk *empire* yang tertanam di dalam diri gereja.

Dengan demikian, politik monoteis yang entah disadari atau tidak telah dipegang dan disalahartikan oleh beberapa gereja sesungguhnya perlu untuk dikritisi dan dievaluasi karena pada praksisnya, ia akan dan berpotensi menjadi sebuah *empire* yang baru, yang sarat dengan sistem yang hirarkis. Maka tidak heran jika pihak tertentu dalam gereja yang merasa memiliki kedudukan lebih tinggi (entah secara sadar atau tidak, sengaja atau tidak) akan memperlakukan rekannya sebagai pihak yang lebih rendah. Pandangan Moltmann tersebut seharusnya dapat mengusik setiap orang yang terlibat dalam gereja sekaligus menjadi masukan dan evaluasi yang berharga bagi setiap pemimpin gereja. Sebaliknya, Moltmann memperlihatkan bahwa politik yang berdasarkan prinsip persekutuan Allah Tritunggal, tidak hanya menawarkan kebebasan,

kesetaraan, tetapi juga persaudaraan sehingga setiap orang baik di dalam maupun di luar gereja dapat menikmati dan menghayati dengan sungguh-sungguh makna dari hidup dalam kebersamaan, termasuk dalam bidang politik. Politik bukanlah hal yang kotor. Orang-orang yang terlibat di dalamnya lah yang kotor. Politik adalah hal yang netral bahkan dapat menjadi kebaikan bagi banyak orang. Untuk itulah persekutuan Allah Tritunggal dihadirkan dan diharapkan agar prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya (seperti kebebasan, kesetaraan, kasih, dan lain-lain) dapat diterapkan. Apabila hal tersebut dilakukan dengan benar, maka niscaya, pola pikir masyarakat yang keliru tentang politik secara perlahan-lahan mengalami perubahan.